

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sektor yang menjadi andalan untuk meningkatkan capaian devisa Indonesia saat ini adalah pariwisata. Terbukti dalam data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2018 yang menyatakan bahwa pariwisata menempati posisi kedua terbesar setelah *crude palm oil* (minyak sawit) dan sektor lainnya. Devisa negara saat ini mencapai 19,3 Miliar USD dan terus meningkat sebanyak 20% di tahun 2018. Dalam rangka membuat pariwisata Indonesia semakin berkembang pemerintah membuat berbagai program salah satunya pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia diantaranya Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung kelayang (Belitung), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Pulau Morotai (Maluku Utara), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara). Sepuluh Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP) tersebut, tentunya memiliki ciri-ciri dan keindahan serta arah pembangunan yang memiliki karakteristik alam yang berbeda-beda agar terhindar dari kerusakan dan terus mengalami keberlanjutan.

Wakatobi merupakan salah satu destinasi prioritas pariwisata yang diusung oleh pemerintah yang dikembangkan ke arah ekowisata, sebagaimana telah tercantum di Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Wakatobi Tahun 2016-2025 yang menyebutkan bahwa visi Wakatobi yaitu “Terwujudnya Wakatobi sebagai Destinasi Ekowisata Berkelas Dunia”. Untuk itu banyak yang harus dilakukan dalam pembangunan pariwisata Wakatobi untuk dapat mewujudkan visi tersebut.

Menurut *The International Ecotourism Society* (TIES) dalam Yulius, dkk (2018:6) bahwa Ekowisata menjadi salah satu konsep yang salah satu prinsipnya dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi pada sebuah destinasi wisata dan yang menjadi trend dalam pembangunan pariwisata dimana kecenderungan wisatawan saat ini melakukan perjalanan kembali ke alam (Arida, 2017).

Ekowisata juga dijadikan alternatif paling mudah dan cocok digunakan sebagai benchmark dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Kemenparekraf, 2019). Ekowisata merupakan aspek pengelolaan yang dapat mendukung pembangunan ekosistem berkelanjutan (Fandeli, 2000). Pariwisata berkelanjutan diperlukan agar potensi pemanfaatan, keindahan alam, pengoptimalan serta kelestarian alam bisa digunakan sampai generasi selanjutnya (Insani dkk, 2019). Menurut *The International Ecotourism Society* (TIES, 2015) mendefinisikan bahwa ekowisata adalah suatu perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami untuk melestarikan lingkungan, mensejahterakan masyarakat setempat, dan melibatkan interpretasi dan pendidikan.

Wakatobi memiliki empat gugusan pulau besar diantaranya Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko. Wakatobi ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut pada tahun 2003 dan ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh *United Nation of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2012, karena memiliki kekayaan bawah laut yang memukau dan memiliki keragaman biota laut dan karang. Sehingga pembangunan Wakatobi diarahkan ke arah ekowisata bahari sebagaimana tercantum dalam RIPPDA 2016-2025. Selain ekowisata laut (bahari), Wakatobi juga memiliki potensi wisata lain yang sedang dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan visinya yaitu pengembangan Ekowisata Mangrove.

Keberadaan hutan mangrove terbesar berada di Pulau Kaledupa yakni hampir berada di seluruh desa. Hal tersebut juga tercantum pada Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) dalam RIPPDA Wakatobi Tahun 2016-2025 bahwa Pulau Kaledupa diarahkan pada pengembangan ekowisata mangrove. Adapun alasan pemerintah menambah wisata baru (ekowisata mangrove) adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan ke Wakatobi. Secara teoritis, semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata maka semakin banyak uang yang dibelanjakan (Wijaya, 2011) dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Hutan mangrove dapat dibangun berdasarkan isu lingkungan (ekowisata). Dalam hal ini, wisata mangrove dapat diartikan sebagai pemanfaatan fisik kawasan hutan mangrove dan seluruh biota di dalamnya untuk dijadikan sebuah objek atau kawasan wisata (Yulius dkk, 2018).

Kawasan hutan mangrove tersebut berada di Desa Tampara pulau Kaledupa, dan baru saja diluncurkan dan didukung oleh *stakeholder* pemerintah Wakatobi sebagai kawasan wisata pada tanggal 27 November 2019 silam dengan memiliki luas 108,65 hektar, memiliki 10 jenis mangrove dan 11 jenis burung (sumber: Data YKAN dan Balai Taman Nasional Wakatobi, 2019). Hadirnya pembangunan kawasan wisata mangrove tersebut merupakan wujud nyata dari peningkatan inisiatif masyarakat dalam mengembangkan daya tarik wisata dan sebagai wujud promosi agar pengunjung wisata menambah lama tinggal serta meningkatkan pendapatan daerah (Wijaya dan Mustika, 2014).

Kawasan wisata mangrove di Desa Tampara didukung oleh pemerintah dan *stakeholder* terkait seperti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)/ *The Nature Conservancy* (TNC) dan PT. First Investment Indonesia. Menurut

pihak BTNW dan YKAN/TNC, inisiasi awal dijadikannya tempat wisata di kawasan hutan mangrove Desa Tampara adalah agar mampu meningkatkan nilai konservasi untuk melindungi ekosistem mangrove dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tampara setempat.

Pengembangan kawasan ekowisata hutan mangrove tersebut juga telah ada dalam perencanaan Desa Tampara. dan pihak YKAN mendukung rencana tersebut dengan memberikan bantuan dana dengan dibangunnya jembatan titian untuk dapat menyusuri kawasan hutan mangrove dan mewujudkan cita-cita masyarakat desa Tampara.

Namun, permasalahan di Kawasan Ekowisata Mangrove Desa Tampara tersebut belum ada master plan untuk perencanaan pengembangan kedepan ingin dijadikan ekowisata pada level seperti apa, belum ada aktivitas yang menjelaskan mengenai jenis-jenis flora (tumbuhan mangrove), fauna atau biota laut unik lainnya yang dapat mengedukasi pengunjung saat ke kawasan wisata mangrove serta fasilitas yang minim seperti jembatan titian yang belum selesai dibuat yang membuat pengunjung tidak berlama-lama saat menyusuri kawasan mangrove Tampara tersebut. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat dan keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove yang dapat mengakibatkan kawasan mangrove tampara tidak mengalami keberlanjutan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Mangrove Ecotourism Opportunity Spectrum* (MEOS) yang merupakan basis dari konsep *Recreational Opportunity Spectrum* (ROS) yang didalamnya memiliki 2 indikator diantaranya indikator ekologi dan fasilitas yang perlu dipecahkan di sebuah kawasan ekowisata mangrove dan dapat menghasilkan arah pengelolaan untuk Kawasan Ekowisata Mangrove Desa Tampara Pulau Kaledupa. Menurut Wardhani (2013:101) MEOS adalah

alat analisis atau kerangka kerja yang dapat membantu untuk memahami area karakteristik fisik dan arah pengelolaan yang secara khusus dapat menggambarkan kawasan hutan mangrove desa Tampara menjadi area Ekowisata.

MEOS memiliki indikator dan kategori yang telah dimodifikasi oleh para ahli: Newman et al (2001), Aukerman (2004, dan Yulianda (2007) dalam Wardhani (2013:101) yang dapat memetakan karakteristik ekowisata mangrove tampara berdasarkan indikator standar ekologi dan fasilitas yang ada, sehingga zona atau spektrum yang diperoleh ekowisata kawasan mangrove sesuai dengan kategori MEOS dan menentukan arah pengelolaan di kawasan Mangrove tersebut. MEOS juga sering digunakan oleh para peneliti yang melakukan penelitian di kawasan cagar alam, taman nasional dan area-area konservasi lainnya.

Menurut pihak pengelola Kawasan Ekowisata mangrove desa tampara, kawasan tersebut dicanangkan sebagai kawasan wisata berbasis ekowisata dan memerlukan perencanaan serta arah pengelolaan yang sesuai dengan fungsi ekowisata untuk mempermudah proses pengelolaan wisata mangrove kedepannya. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan fungsi MEOS, maka MEOS dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mendukung arah pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove di Desa Tampara tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penelitian ini mengangkat topik dengan judul “Kajian Ekowisata Mangrove Dengan Pendekatan *Mangrove Ecotourism Opportunity Spectrum* di Desa Tampara, Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus untuk mengkaji karakteristik ekowisata mangrove Desa Tampara berdasarkan indikator *Mangrove Ecotourism Opportunity Spectrum* (MEOS) yaitu indikator dari standar ekologi dan fasilitas. Kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diharapkan menentukan kemana arah pengelolaan yang lebih baik untuk Kawasan Ekowisata Mangrove Desa Tampara kedepan.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik Mangrove dengan Indikator dari *Mangrove Ecotourism Opportunity Spectrum* (MEOS) dengan melihat standar ekologis dan fasilitas di Kawasan Mangrove Desa Tampara.

### D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah jaringan telepon yang sering mengalami gangguan dan listrik yang terbatas di pulau Kaledupa membuat peneliti cukup terhambat dalam mencari sumber referensi secara online serta sulitnya mobilitas pergerakan dalam hal perizinan dan pertemuan langsung dengan pihak pengelola dan pihak-pihak partisipan pendukung lainnya .

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi akademis untuk menambah pengetahuan serta memudahkan dalam proses kemana arah pengembangan atau pengelolaan Ekowisata Mangrove khususnya untuk Desa Tampara dan umumnya untuk pembangunan Ekowisata Wisata mangrove di Wakatobi.